

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp-1,2 T (-73,8%)
▲1405,0% (yoy)

Belanja

Rp2,8 T (10,2%)
▲29,0% (yoy)

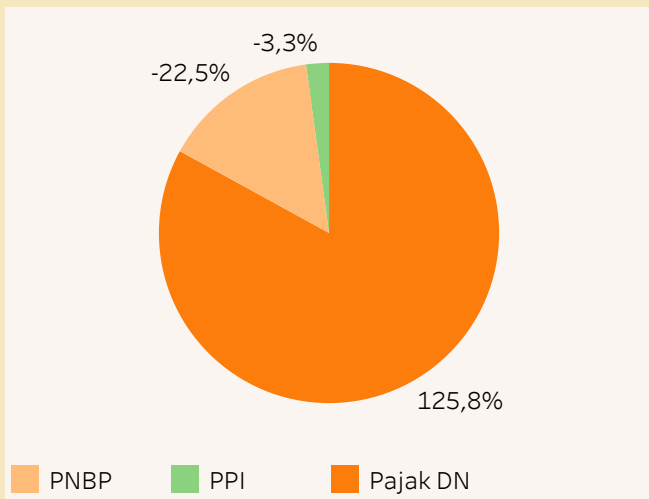
Defisit

Rp-4,0 T (15,3%)
▲75,6% (yoy)

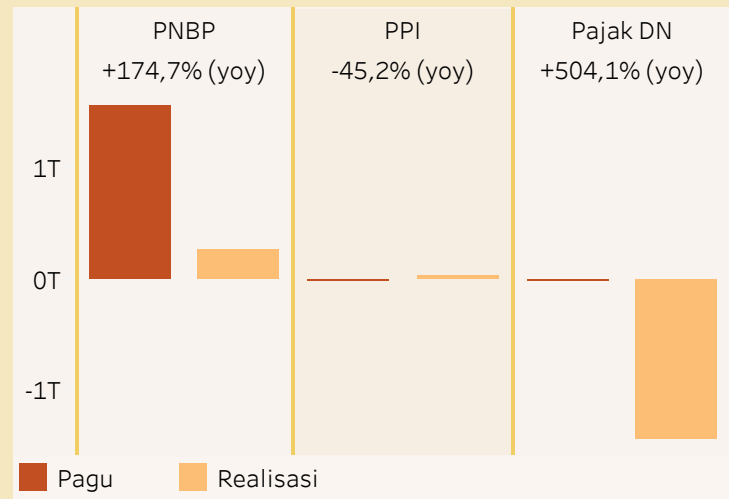
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



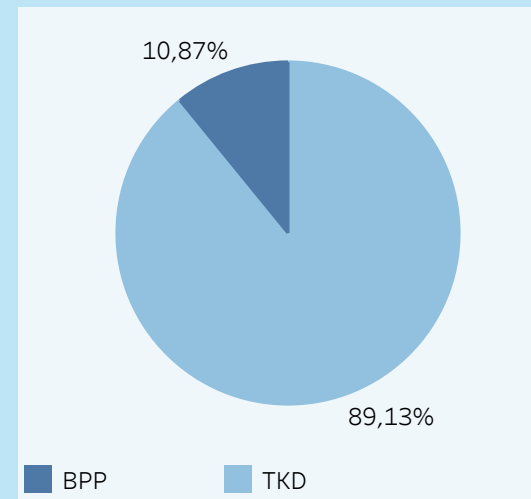
Persentase Komposisi Pendapatan



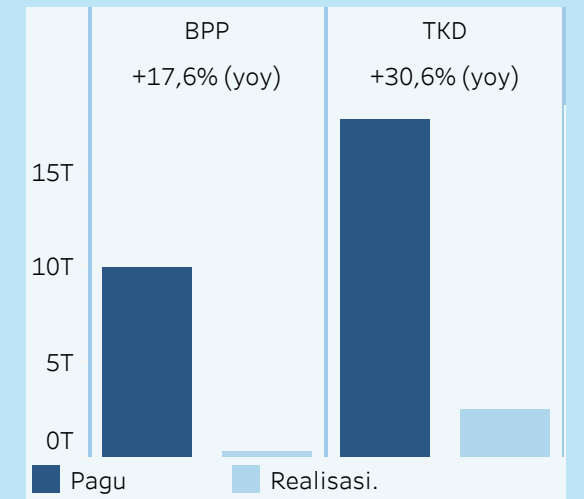
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



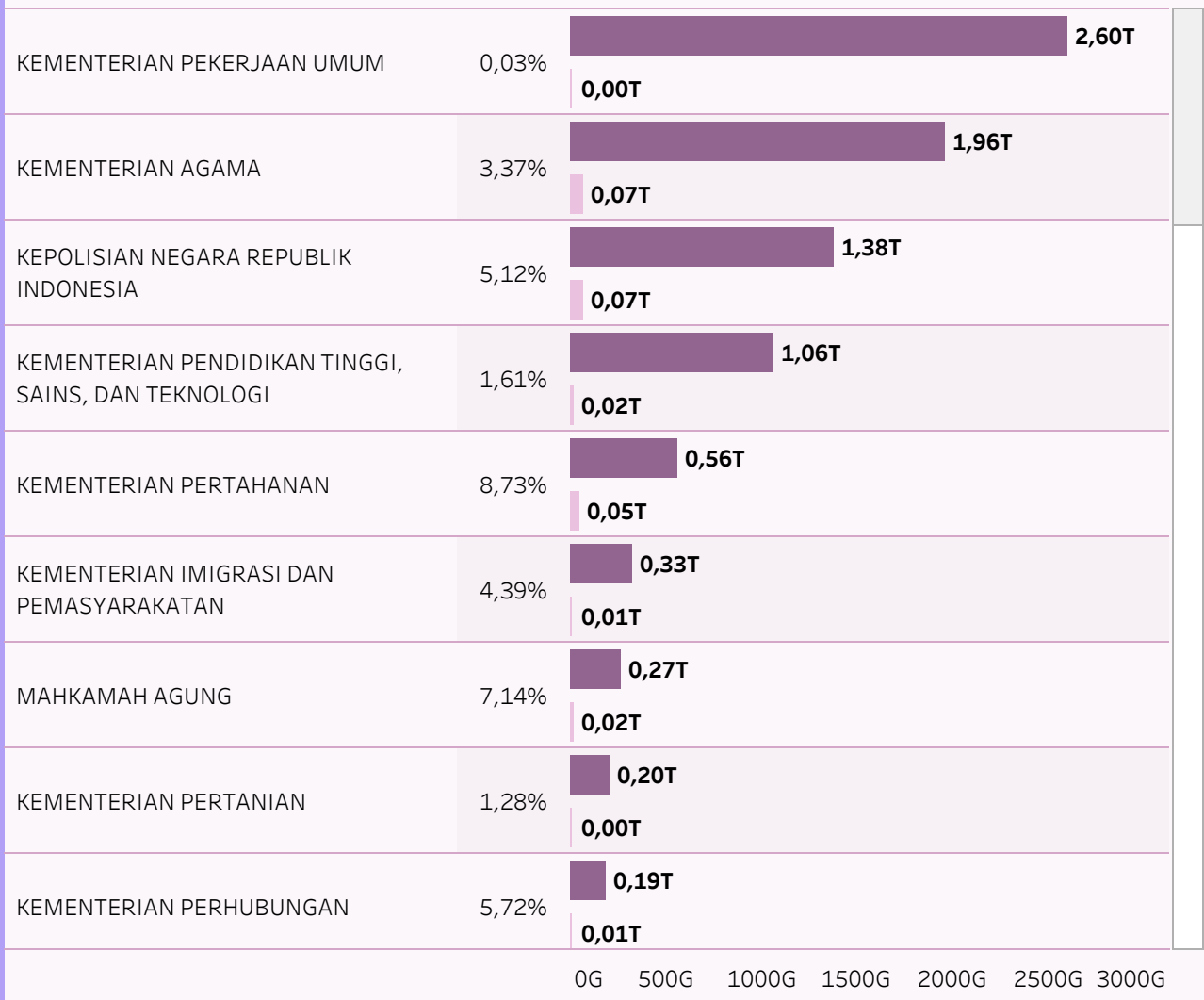
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Sel..	0,1T	1,2T	▲1404,98%
Grand Total	0,1T	1,2T	▲1404,98%

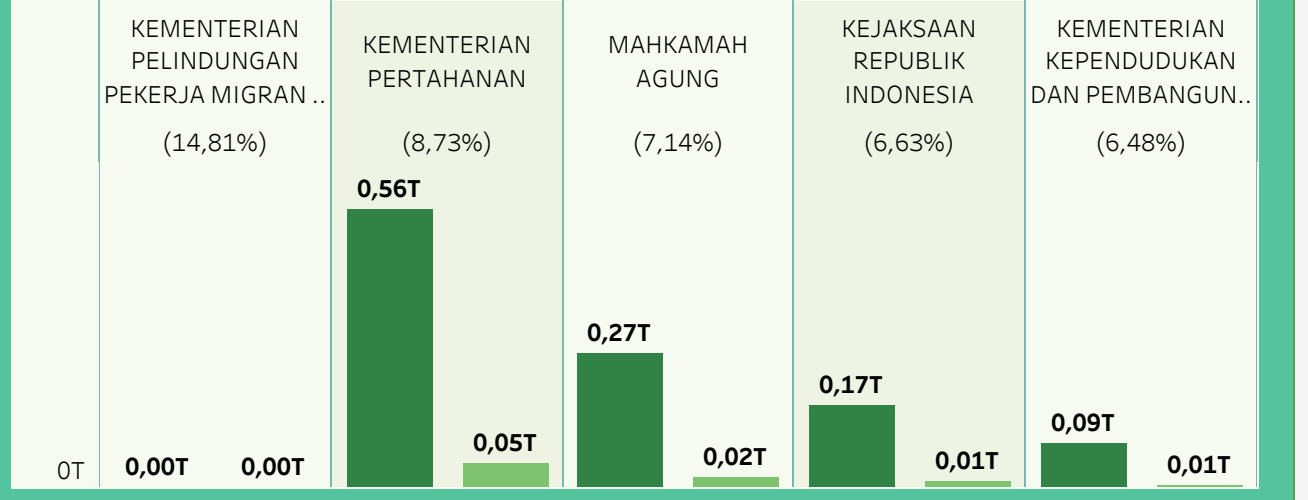
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	2,2T	5,2%	27,6T	2,8 T	10,2%	▲29,04%
Grand Total	41,8T	2,2T	5,2%	27,6T	2,8 T	10,2%	▲29,04%

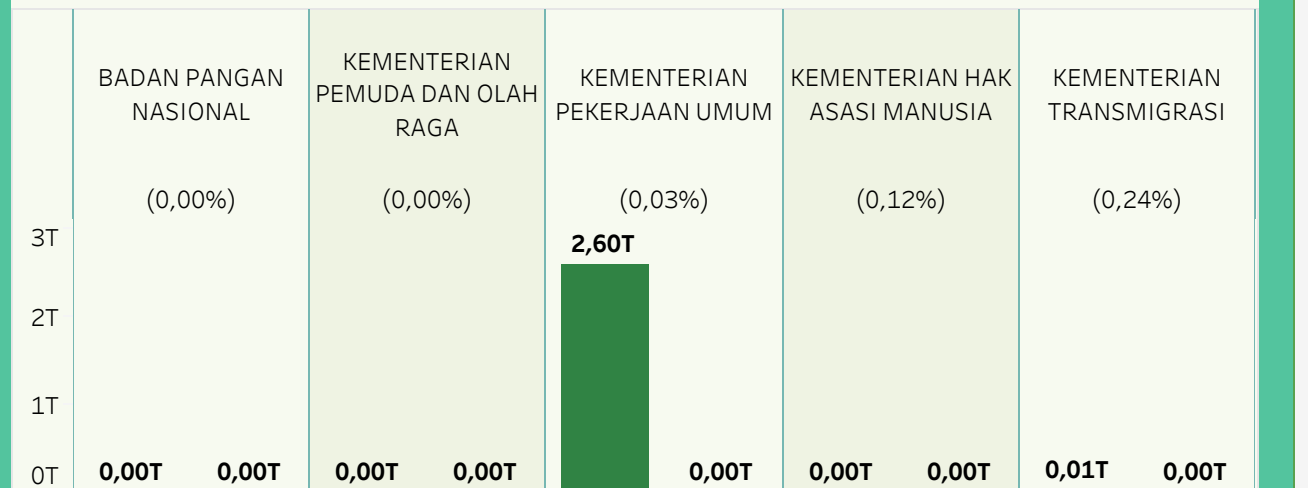
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



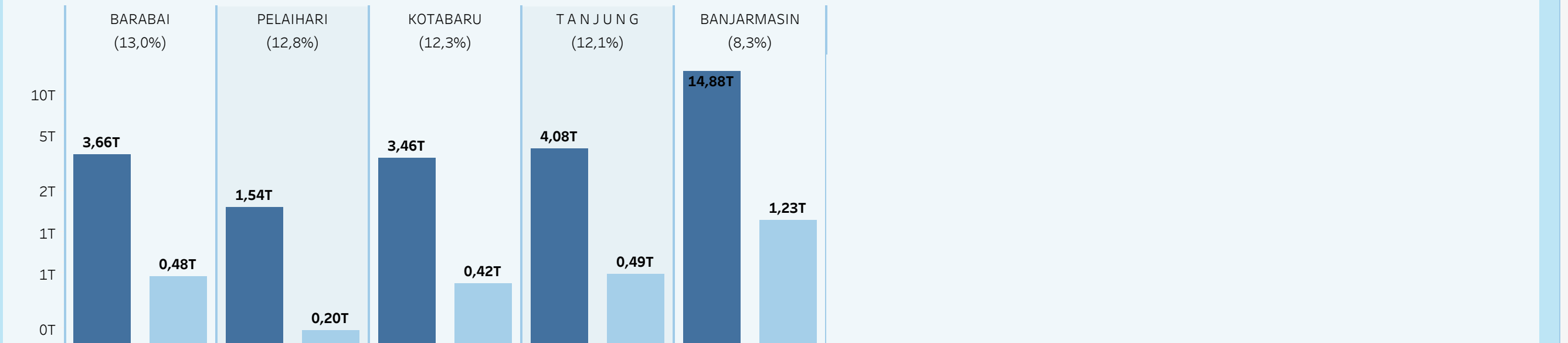
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



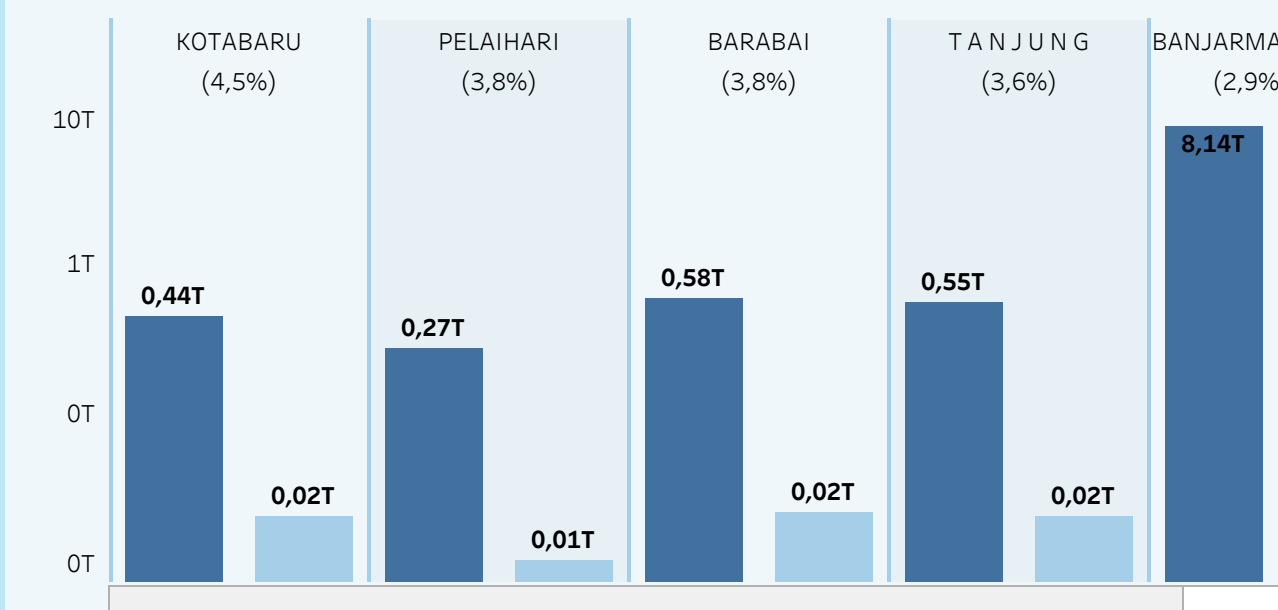
5 KL Persentase Realisasi Terendah



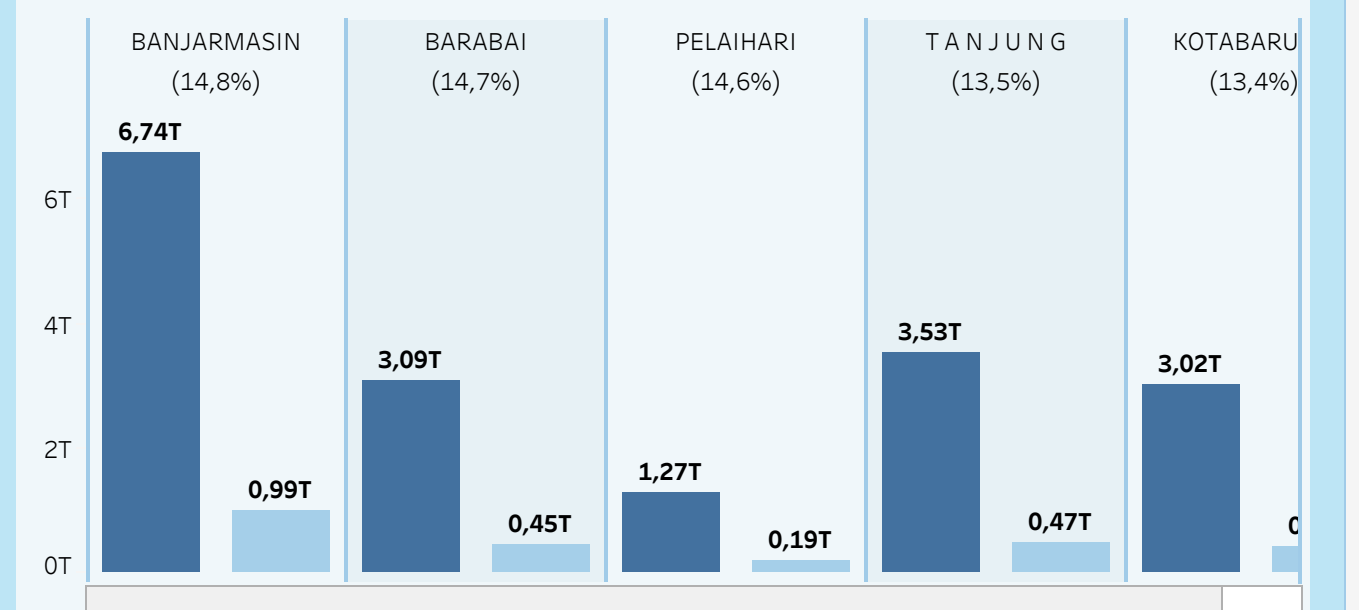
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 30 Januari 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp-1,15 triliun (-5,23%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,05 triliun, tumbuh minus sebesar 1.404,98% yoy (dari Rp-76 M menjadi Rp-1,15 T). Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai -7,12% (Rp-1,45 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 14,57% (Rp37,85 miliar), serta PNBP mencapai 18,10% (Rp259,19 miliar). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (125,8%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 30 Januari 2026

1. **Kinerja Belanja Negara sebesar Rp2,8 triliun (10,2%) dari pagu Rp27,6 triliun, tumbuh 29,04% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 3,1% (Rp306,76 miliar) dari pagu Rp9,97 triliun, tumbuh 17,6% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 14,3% (Rp2,51 triliun) dari pagu Rp17,64 triliun, tumbuh 30,6% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (89,13%).

2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi**, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,60 triliun, dengan realisasi mencapai 0,03% (Rp0,87 miliar). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 7,86% (Rp0,04 triliun) dari pagu Rp0,44 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 0,99% (Rp2,02 miliar) dari pagu Rp204,99 miliar.

3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah**, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan realisasi 14,81% (Rp0,18 miliar) dari pagu Rp1,22 miliar. Sementara, terdapat 2 K/L yang belum merealisasikan anggaran belanja s.d. 30 Januari 2026 yaitu Badan Pangan Nasional dan Kemenpora.

4. **Kinerja KPPN**, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 13,0% (Rp0,48 triliun) dari pagu Rp3,66 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 8,3% (Rp1,23 triliun) dari pagu Rp14,88 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Kenaikan harga emas yang cukup tinggi meningkatkan basis pengenaan pajak sehingga penerimaan pajak melalui PPh Pasal 22 atas transaksi jual-beli emas diharapkan juga mengalami kenaikan. Sesuai PMK 52/2025 yang mengubah PMK 48/2023, *buyback* emas di atas Rp10 juta kena PPh 1,5% (NPWP), sementara pembelian emas dikenakan PPh 0,25%.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Direktorat Jenderal Pajak agar memanfaatkan momentum kenaikan harga emas yang signifikan dengan mengoptimalkan pengawasan dan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi jual-beli emas. Implementasi PMK 52/2025 perlu dikawal secara konsisten melalui penguatan koordinasi dengan pelaku usaha emas, peningkatan sistem pelaporan transaksi, serta edukasi kepada masyarakat agar pemungutan pajak berjalan efektif, adil, dan tidak menghambat aktivitas perdagangan emas.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Beberapa satker masih menunggu kejelasan pembebanan akun untuk mengalokasikan dana dalam pelaksanaan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. Disamping itu, penggunaan aplikasi gaji PPNPN yang akan digunakan dalam proses pembayaran penghasilan Non-ASN/PPNPN dan juga PPPK Paruh belum menyediakan referensi kepangkatan dan levelitas dari PPPK Paruh Waktu.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan agar segera menerbitkan petunjuk teknis terkait mekanisme pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu, termasuk kejelasan pembebanan akun belanja. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan perlu mempercepat penyempurnaan sistem dengan melengkapi referensi kepangkatan dan levelitas PPPK Paruh Waktu agar pembayaran dapat dilakukan tepat waktu dan akurat.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Unit FLPP yang telah dibangun di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 269 unit dengan rincian 38 unit ready stock, 81 unit proses bank, dan 150 unit terjual. Realisasi FLPP di Kalimantan Selatan meningkat dari sebanyak 41 unit menjadi 150 unit. Jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari sebanyak 30 Lokasi menjadi 80 Lokasi. Jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 12 Kab./Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat dari semula sebesar Rp5.402.538.000,- menjadi Rp19.704.046.500,-

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

C | Koperasi Desa Merah Putih,

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

1. Jumlahkoperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (microsite) sebanyak 2.013
2. Jumlahkoperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 947 menjadi 948.
3. Jumlahkeseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 1089 menjadi 1.091.
4. Jumlahkoperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 155 menjadi 157
5. Jumlahpermohonan proposal bisnis semula 463 menjadi 465.

Progres Fase III

1. JumlahAset (Pemetaan Lahan) semula sebanyak 826 menjadi 837
2. Total Desa/Kelurahansebanyak2016

D | Sekolah Rakyat,

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR sd Saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 Unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

E | Revitalisasi Sekolah, Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 29 Sekolah/ Madrasah, yang dilaksanakan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum

F | SMA Unggul Garuda,

Target Jumlah Sekolah Garuda

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda sd saat yang sudah berjalan (unit)

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel)
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada update

G | Ketahanan Pangan, Pada Tahun 2026, data s.d. saat ini telah teralokasi dana sebesar Rp265,05 Miliar

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

- Masih terdapat ketimpangan realisasi FLPP antar Kabupaten di Kalimantan Selatan.
- Pembangunan infrastruktur oleh pemda untuk mendukung perumahan FLPP masih berjalan lambat.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

- Pemerataan program FLPP antar daerah. Tingkatkan kuota dan dukungan teknis di kabupaten dengan realisasi rendah.
- Perlu adanya dukungan dari Pemda dan pihak terkait lainnya (PLN dan PDAM) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung perumahan FLPP.

C | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

D | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Sampai dengan saat ini, belum diperoleh *update* terkait mekanisme dan penggunaan dana desa untuk mendukung KDMP, apakah dipergunakan untuk pembangunan gerai, pengadaan lahan, atau untuk keperluan lain.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

DJPK agar segera menerbitkan juknis terkait penggunaan dana desa untuk KDMP dan melakukan sosialisasi bersama Dit. PA kepada KPPN.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Telah tersedia alokasi pagu pada DIPA TA 2026 Kemen PU sebesar Rp570,72 M untuk pembangunan Sekolah Rakyat di 3 Lokasi Kalimantan Selatan.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Kemen PU agar segera menindaklanjuti dengan melakukan percepatan penetapan rencana kerja dan anggaran rinci, penyusunan desain teknis serta dokumen pengadaan sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dimulai tepat waktu.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Sebanyak 926 sekolah di Kalimantan Selatan dari berbagai jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, mengalami kerusakan akibat banjir, dengan rincian yaitu PAUD sebanyak 372, SD 421, SMP 83, serta SMA dan SMK sederajat sebanyak 50 sekolah.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Perlu dilakukan asesmen cepat untuk penentuan prioritas, penyediaan ruang belajar sementara agar pembelajaran tetap berjalan, percepatan rehabilitasi sekolah rusak ringan dan sedang, serta rekonstruksi sekolah rusak berat dengan standar bangunan tahan banjir, didukung sinergi pendanaan pusat dan daerah, sehingga pemulihan pendidikan berjalan cepat, merata, dan lebih tangguh terhadap bencana.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Ketahanan pangan daerah masih menghadapi tantangan keberlanjutan produksi, meski program prioritas telah disusun, sektor tanaman pangan Kalsel masih rentan terhadap perubahan iklim, keterbatasan lahan produktif, serta fluktuasi hasil panen yang dapat mengganggu stabilitas pangan.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memastikan program prioritas benar-benar diimplementasikan secara konsisten melalui penguatan perencanaan dan penganggaran yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti dukungan irigasi, teknologi pertanian tahan cuaca ekstrem, serta sistem peringatan dini gagal panen.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

A | Isu MBG, meliputi:

- Sampai dengan saat ini, target SPPG di Kalimantan Selatan masih belum terpenuhi.
- Kurangnya kapasitas rantai pasok lokal berisiko menyebabkan ketergantungan bahan baku dari luar daerah yang dapat memicu kenaikan harga pangan lokal.

Isu dan Rekomendasi MBG

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

- Perlunya keterlibatan berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait pembangunan SPPG di Kalimantan Selatan.
- Perlunya aktivasi KDMP sebagai *supplier* dengan menunjuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai *off-taker* resmi untuk menyerap hasil tani (telur, beras, ikan) dari petani lokal